

# Wilayah Pengembangan di Jawa Tengah: Bukan Sekedar Nama dan Pengelompokan Wilayah

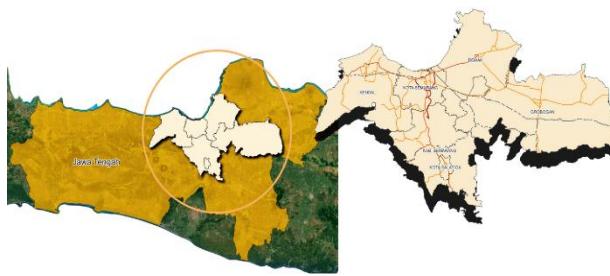
## (Analisis Wilayah Kedungsepur)

### **Ringkasan Eksekutif**

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan 10 Wilayah Pengembangan (WP) sebagai inovasi kebijakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan integrasi rantai pasok produksi wilayah, skala ekonomi, dan daya saing regional. Wilayah Pengembangan tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung daya saing ekonomi Jawa Tengah, namun tidak adanya kelembagaan dan kurangnya koordinasi lintas wilayah menghambat optimalisasi potensi ini. Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga, Purwodadi) merupakan salah satu Wilayah Pengembangan dimana Kota Semarang mendominasi aktivitas ekonomi, sementara wilayah pendukung seperti Kendal, Demak, dan Grobogan belum memaksimalkan kontribusinya. Untuk meningkatkan potensi WP tersebut, diperlukan kelembagaan yang mampu menyelaraskan perencanaan lintas wilayah, memperkuat kolaborasi, dan mengintegrasikan rantai pasok ekonomi. Dengan kelembagaan yang terintegrasi dan kolaborasi yang kuat pada WP, Jawa Tengah dapat mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing provinsi, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Kebijakan yang diusulkan untuk memperkuat peran Wilayah Pengembangan (WP) mencakup tiga aspek utama. Pertama, pembentukan Badan Pengelola Wilayah Pengembangan yang menjalankan peran Provinsi dalam mengoordinasikan perencanaan dan implementasi pembangunan lintas daerah. Kedua, pemberian insentif fiskal dan penyederhanaan regulasi (seperti, kemudahan izin investasi dan dukungan rantai pasok). Ketiga, integrasi program pembangunan wilayah pengembangan dalam Masterplan Pembangunan Daerah, sehingga sektor unggulan dapat berkembang secara sinergis dalam kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

### **Pendahuluan**

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Posisi strategis Jawa Tengah tercermin dari kontribusinya sebagai penyumbang terbesar keempat perekonomian nasional, dengan kontribusi sebesar 14,49% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98% pada tahun 2023. Untuk mengoptimalkan potensi ini, Jawa Tengah telah menetapkan 10 Wilayah Pengembangan (WP) sebagai inovasi kebijakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan integrasi rantai pasok produksi wilayah, skala ekonomi, dan daya saing regional.



**Gambar 1**  
**Positioning Wilayah Pengembangan Kedungsepur**  
**Sumber: Data Diolah, 2024**

Salah satu Wilayah Pengembangan yang strategis dalam mendorong daya saing Provinsi Jawa Tengah adalah WP Kedungsepur, yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal,

Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Semarang. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi. Kedungsepur didukung oleh infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, serta lokasi geografisnya yang berada di jalur Pantura. Potensi ini menjadikan Kedungsepur sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan sektor logistik, pariwisata, jasa, dan manufaktur.

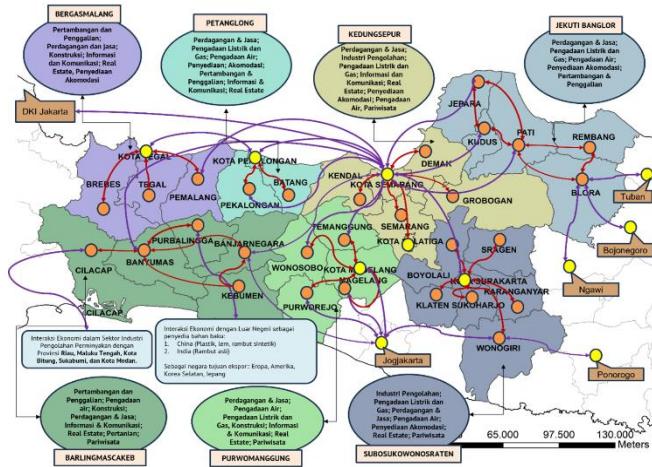
Namun, data menunjukkan adanya tantangan besar dalam pengelolaan wilayah ini. Kota Semarang, sebagai pusat Kedungsepur, mencatat kontribusi dominan terhadap PDRB Jawa Tengah sebesar 14,67% dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 5,79% pada tahun 2023 (tabel 1). Pola interaksi ekonomi juga menunjukkan sentralisasi aktivitas di Kota Semarang, di mana daerah sekitarnya hanya berperan sebagai pemasok bahan baku dan tenaga kerja (gambar 3).

**Tabel 1.**  
**Kontribusi terhadap PDRB Jawa Tengah dan Pertumbuhan Ekonomi WP Kedungsepur Tahun 2023**

Kab/Kota	Kontribusi PDRB	Pertumbuhan Ekonomi
Kota Semarang	14,67%	5,79
Demak	3,61%	4,74
Kendal	3,20%	5,56
Grobogan	2,05%	3,10
Salatiga	1,95%	5,01
Kota Salatiga	0,99%	5,34

**Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024**

Tantangan ini menunjukkan perlunya upaya integrasi ekonomi yang lebih baik di Kedungsepur melalui kelembagaan yang efektif. Dengan membangun sistem produksi rantai pasok yang terintegrasi, setiap daerah dalam Kedungsepur dapat memaksimalkan peran dan potensi masing-masing, sehingga dominasi Kota Semarang dapat diminimalisir. Penguatan kelembagaan ini menjadi kunci untuk memastikan pembangunan yang produktif, efisien, dan berdaya saing, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada perekonomian regional dan nasional.



Gambar 3

Interaksi Wilayah Kab/Kota di Jawa Tengah  
Sumber: Hasil Analisis, 2024 (diolah)

## Deskripsi Masalah

Kedungsepur memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi di Jawa Tengah, namun kelembagaan yang mengelola kawasan ini masih kurang terkoordinasi. Hal ini tercermin dari aglomerasi dan koneksi sistem rantai produksi yang belum optimal (Gambar 6), masih rendahnya investasi produktif (Gambar 5), dan minimnya kolaborasi antarwilayah. Buktinya dari lemahnya kelembagaan dapat dilihat dari forum kerja sama daerah yang pernah dibentuk tetapi tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi yang cukup untuk mewadahi kerja sama lintas wilayah, serta tantangan kapasitas dan kesadaran daerah dalam berkolaborasi. Akibatnya, koordinasi antar daerah masih terbatas dan forum kerja sama yang telah ada belum dapat berfungsi secara optimal. Untuk mengatasi masalah ini tanpa membebani birokrasi, diperlukan kelembagaan berbentuk lembaga *ad hoc* yang lebih fleksibel, efektif, dan memiliki legitimasi yang cukup dalam mengoordinasikan pengembangan Wilayah Kedungsepur. Pendekatan strategis diperlukan untuk mengoptimalkan potensi dan kontribusinya terhadap perekonomian regional dan nasional.

### 1. Kelembagaan dalam Wilayah Pengembangan

Pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah menghadapi tantangan besar dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya pada pengelolaan wilayah pengembangan. Hingga saat ini, belum ada kelembagaan yang secara khusus mengatur dan mengelola masing-masing wilayah pengembangan di Provinsi Jawa Tengah. Koordinasi antarwilayah sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun implementasinya menghadapi berbagai kendala.

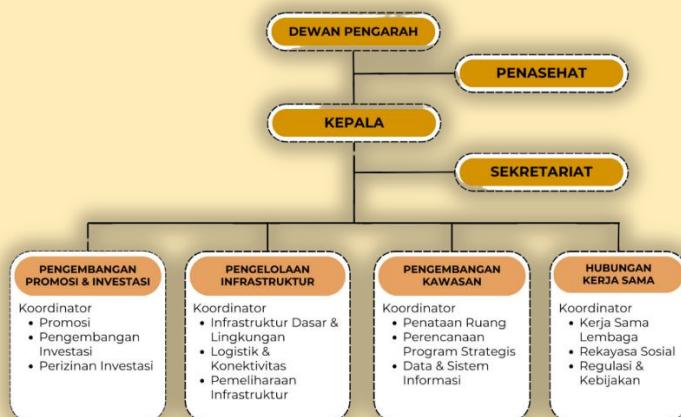
Pembentukan kelembagaan khusus untuk mengelola wilayah pengembangan menjadi urgen. Kelembagaan ini diharapkan mampu memastikan harmonisasi kebijakan antarwilayah, memfasilitasi kolaborasi lintas sektor, dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi yang lebih terarah, sesuai dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 mengenai percepatan pembangunan ekonomi.

## Belajar dari Konsep Wilayah Pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana

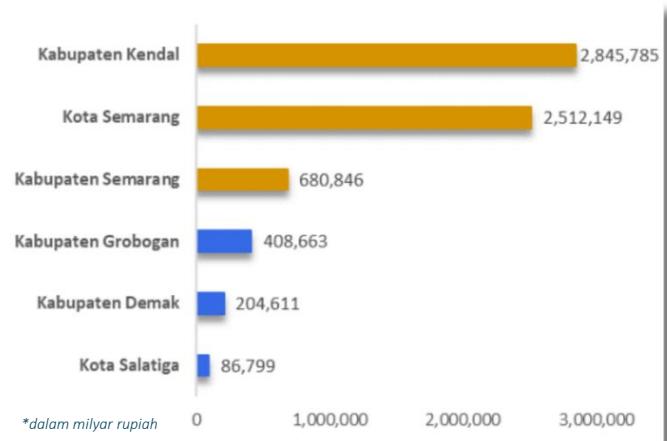
Kawasan Metropolitan Rebana merupakan aglomerasi kawasan peruntukan industri di Kabupaten Subang-Indramayu – Majalengka - Sumedang-Cirebon serta kawasan pendukungnya Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon. Keberhasilan pengelolaan Rebana ditandai oleh beberapa capaian utama:

- Pembentukan Badan Pengelola Kawasan:** Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2020, dibentuk Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati. Kepala Badan Pengelola Metropolitan Rebana berperan dalam koordinasi, fasilitasi, pengendalian, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan kawasan.
- Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi:** Dengan adanya 81 proyek setara Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021, Rebana diproyeksikan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7,77% dan menciptakan 4,39 juta lapangan kerja baru pada tahun 2030.
- Pengembangan Infrastruktur Strategis:** Rebana didukung oleh infrastruktur penting seperti Pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Kertajati, dan Pelabuhan Cirebon, yang meningkatkan koneksi regional dan mendorong pertumbuhan sektor logistik, pariwisata, dan manufaktur.

Gambar 4 menunjukkan struktur kelembagaan Wilayah Pengembangan. Susunan kelembagaan ini diamanatkan pada Peraturan Gubernur, di mana Dewan Pengarah beranggotakan Gubernur serta Bupati/Walikota. Ketua Pelaksana dapat merupakan profesional non ASN yang dalam pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 urusan koordinasi.



Gambar 4  
Struktur Kelembagaan Badan Pengelola Kawasan WP  
Sumber: Badan Pengelola Kawasan Rebana



**Gambar 5**  
Realisasi Investasi Provinsi Jawa Tengah dan Kedungsepur Triwulan 1 2024  
Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2024 (diolah)

## 2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Aglomerasi Ekonomi dan Kurangnya Incentif Investasi

Metropolitan Kedungsepur memiliki potensi besar sebagai pusat aglomerasi ekonomi, didukung 11 lokasi strategis seperti Kawasan Industri Kendal, Export Processing Zone Tanjung Emas, dan Kota Lama Semarang. Namun, pemanfaatan potensi ini masih jauh dari optimal, terlihat dari nilai investasi Jawa Tengah yang hanya Rp15,17 triliun pada Triwulan I 2024, menempati peringkat ke-9 nasional dan tertinggal dari Jawa Barat serta DKI Jakarta. Investasi di Kedungsepur terkonsentrasi di Kabupaten Kendal dan Kota Semarang, dengan distribusi yang belum merata (lihat gambar 5).

Kurangnya incentif investasi, seperti incentif fiskal dan penyederhanaan perizinan, menjadi hambatan utama. Promosi kawasan yang kurang agresif juga mengurangi daya tarik Kedungsepur meskipun memiliki keunggulan lokasi strategis. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah strategis melalui pemberian incentif, perbaikan regulasi, dan promosi investasi sektor unggulan. Sinergi lintas pemangku kepentingan diperlukan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing kawasan ini secara signifikan.

Potensi aglomerasi ekonomi (Gambar 6) mengindikasikan pola interaksi wilayah Kedungsepur menunjukkan dominasi Kota Semarang sebagai pusat aktivitas ekonomi utama, dengan hubungan yang kuat terhadap wilayah pendukung seperti Kendal, Demak, Grobogan, dan Kota Salatiga. Kota Semarang berperan sebagai *hub* utama untuk sektor industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi, sementara wilayah pendukung sebagian besar bertindak sebagai pemasok bahan baku dan tenaga kerja. Koneksi ini juga meluas ke luar Kedungsepur, terutama dengan DKI Jakarta dan Surabaya, yang menunjukkan pentingnya kawasan ini dalam rantai pasok ekonomi nasional. Namun, ketergantungan tinggi wilayah pendukung pada Kota Semarang menciptakan ketimpangan yang signifikan, baik dalam distribusi manfaat ekonomi maupun daya saing masing-masing wilayah.

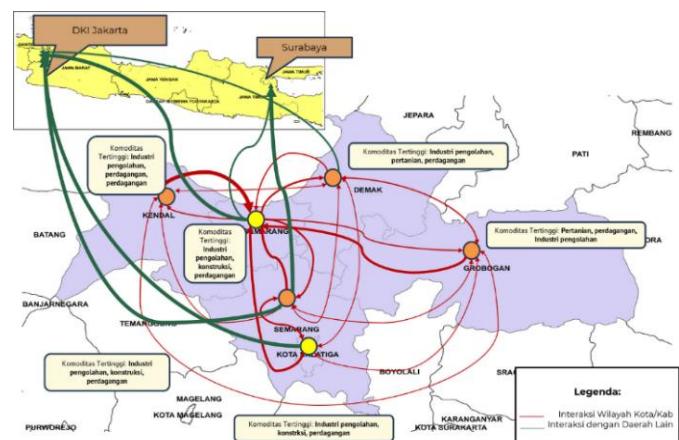
## 3. Kurangnya Kolaborasi Antar Wilayah dan Pemangku Kepentingan

Implikasi terhadap perencanaan wilayah sangat jelas. Diperlukan kolaborasi yang mampu mengintegrasikan perencanaan antarwilayah untuk harmonisasi kebijakan

dan pemerataan manfaat. Kolaborasi ini harus fokus pada pengembangan rantai pasok ekonomi yang terintegrasi sesuai potensi unggulan masing-masing wilayah, seperti Kendal sebagai pusat manufaktur, Grobogan sebagai pemasok bahan baku pertanian, dan Demak sebagai penghubung perdagangan.

Kolaborasi antarwilayah dalam Wilayah Pengembangan Kedungsepur perlu difasilitasi melalui mekanisme yang terstruktur. Salah satu langkah utama adalah pembentukan Badan Pengelola Wilayah Pengembangan yang menjalankan fungsi provinsi untuk mengoordinasikan urusan lintas daerah dengan kabupaten/kota terkait. Badan ini bersifat *ad hoc* yang dibentuk dengan SK gubernur, bertugas meningkatkan kolaborasi antar daerah serta mendorong efektivitas pengembangan rantai pasok produk unggulan. Selain itu, diperlukan incentif fiskal dan regulasi yang berfokus pada operasional kegiatan untuk memacu investasi di sektor unggulan. Seluruh upaya ini harus terintegrasi dalam Masterplan Pembangunan Provinsi agar kebijakan pembangunan lebih sinergis dan efektif.

Pelibatan aktif sektor swasta dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan partisipasi dan rasa kepemilikan bersama. Dengan meningkatkan kolaborasi ini, Kedungsepur dapat mengoptimalkan potensinya, memperkuat daya saing, dan mendorong pembangunan yang lebih merata dan inklusif.



**Gambar 6**  
Interaksi Wilayah Kedungsepur  
Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2024

## Rekomendasi Kebijakan

Pembangunan wilayah yang optimal memerlukan pendekatan kelembagaan yang strategis guna mengakomodir kepentingan daerah dan menjembatani kepentingan Provinsi untuk mengoptimalkan produktivitas kabupaten/kota. Rekomendasi pembentukan Badan Pengelola Kawasan (BPK) dengan mandat khusus antara lain:

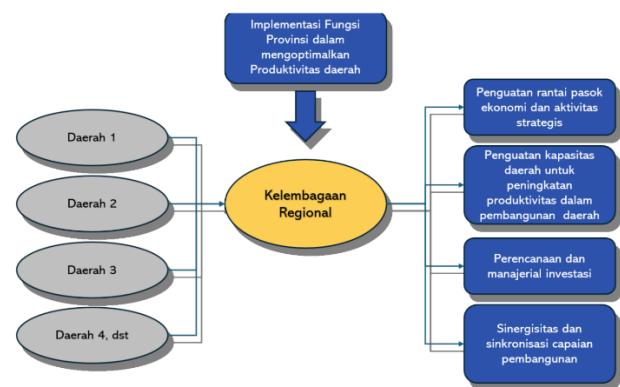
1. Penguatan rantai pasok ekonomi dan aktivitas strategis dan keterkaitan antar wilayah.
2. Penguatan kapasitas daerah untuk peningkatan integrasi produktivitas dalam sistem pembangunan wilayah yang terintegrasi.
3. Perencanaan manajerial investasi yang profesional.
4. Sinergitas dan sinkronisasi capaian pembangunan sesuai dengan kebijakan daerah.
5. Integrasi sistem pelayanan publik bersama *pentahelix* dalam sistem pengembangan wilayah.

### 1. Pembentukan Kelembagaan Kawasan Metropolitan Kedungsepur

- Membentuk Badan Pengelola Kawasan (BPK) Kedungsepur dengan mandat khusus untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan mengelola pembangunan wilayah secara lintas sektor dan lintas daerah sebagai implementasi fungsi provinsi dalam mengoptimalkan integrasi rantai pasok, dan produktivitas dalam skala ekonomi wilayah.
- Struktur kelembagaan dapat mengadopsi model Badan Pengelola Kawasan Metropolitan berupa pengelola kawasan yang dilakukan Provinsi, melibatkan pemerintah pusat, dan daerah secara sinergis, dalam rangka mengintegrasikan rantai pasok kawasan WP.
- Kelembagaan ini memiliki 4 pilar strategis yaitu Penguatan rantai pasok ekonomi dan aktivitas strategis; Penguatan kapasitas daerah untuk peningkatan produktivitas dalam pembangunan daerah; Perencanaan dan manajerial investasi; dan Sinergitas dan sinkronisasi capaian pembangunan.
- Badan Pengelola Kawasan ini agar tidak membebani struktur dan anggaran kelembagaan yang ada, dapat berupa badan pengelola *ad hoc* yang diisi oleh profesional dan dapat dilakukan dengan skema *public-private partnership*.

## Referensi

- Audretsch, D. (2017). The strategic management of places and regional competitiveness. *Handbook of Regions and Competitiveness: Contemporary Theories and Perspectives on Economic Development*, 518-535.
- Bobrovskaya, O. Y., Savostenko, T. O., Polska, I. E., Popruga, V. I., Ogdansky, K. M., Shevchenko, L. G., Kakhovskaya, O. V., Kurinny, O. V., & Matveev, O. Yu. (2013). Regional competitiveness provision in the context of economic development activation. *Dnipropetrovsk: DRIDU NADU*.
- Camagni, R. (2017). Regional competitiveness: Towards a concept of territorial capital. *Seminal Studies in Regional and Urban Economics: Contributions from an Impressive Mind*, 115-131. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-57807-1\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-319-57807-1_6)
- Capello, R. (2017). Seminal studies in regional and urban economics: Contributions from an impressive mind. *Seminal Studies in Regional and Urban Economics: Contributions from an Impressive Mind*, 1-472. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-57807-1>
- Douglass, M. (1998). A regional network strategy for reciprocal rural-urban linkages: an agenda for policy research with reference to Indonesia. *Third World Planning Review*, 20(1), 1. <https://doi.org/10.3828/twpr.20.1.f2827602h503k5j6>
- Grap, T. K., Amri, M., Low, L., & Yam, T. K. (2013). Competitiveness Analysis and Development Strategies for 33 Indonesian Provinces. In *Southeast Asian Economies* (Vol. 30, Issue 3).
- <https://doi.org/10.1355/ae30-3k>
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017
- Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019
- Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024
- Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024
- Porter, M. E., Deldago, M., Ketels, C., & Stern, S. (2008). Moving to a New Global Competitiveness Index. In *The Global Competitiveness Report 2008-2009* (pp. 43-63). World Economic Forum.
- WEF, W. E. F. (2020). The global competitiveness report: How countries are performing on the road to recovery. In *World Economic Forum*. [www3.weforum.org/docs/WEF\\_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf)
- Porter, M. E., Deldago, M., Ketels, C., & Stern, S. (2008). Moving to a New Global Competitiveness Index. In *The Global Competitiveness Report 2008-2009* (pp. 43-63). World Economic Forum.
- WEF, W. E. F. (2020). The global competitiveness report: How countries are performing on the road to recovery. In *World Economic Forum*. [www3.weforum.org/docs/WEF\\_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf)



**Gambar 7**  
**Konsep Kelembagaan Wilayah Pengembangan Kedungsepur**  
Sumber: Analisis Penyusun, 2024

### 2. Optimalisasi Produktivitas Aglomerasi Ekonomi

- Menyusun masterplan pengembangan kawasan yang memprioritaskan sektor unggulan terintegrasi seperti logistik berbasis pelabuhan, pariwisata *heritage* di Semarang, dan industri manufaktur di Kendal.
- Menyediakan kawasan ekonomi khusus di Kedungsepur dengan infrastruktur penunjang seperti konektivitas jalan tol, kereta api, dan pelabuhan.

### 3. Akselerasi Investasi melalui Skema Incentif

- Memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak daerah untuk investasi di sektor prioritas.
- Mengembangkan sistem satu pintu investasi berbasis kawasan untuk mempermudah izin usaha dan menarik minat investor.

### 4. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah

- Mengadakan forum koordinasi berkala antar kepala daerah di kawasan Kedungsepur untuk menyelaraskan kebijakan.
- Mengembangkan forum koordinasi antar pemerintah daerah dan pihak swasta pelaku produksi komoditas utama daerah dalam sistem WP.
- Menerapkan indikator kinerja wilayah yang terintegrasi dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

## Badan Riset dan Inovasi Daerah

Penanggung Jawab : Mohamad Arief Irwanto

Redaktur : Edi Wahyono

Penulis : M Sakdi

Arif Sofianto

Tri Susilowati

Setyo Aji Wijayanto

Editor : Alfian Prigi Utomo

Telepon  
(024) 3540025

Email  
brida@jatengprov.go.id

Laman  
www.brida.jatengprov.go.id

Alamat  
Jalan Imam Bonjol 190 Semarang